



# LEMHANNAS RI

THE NATIONAL RESILIENCE INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

# newsletter

Tanhana Dharma Mangrva • edisi 98, September 2017



## Kunjungan High Commisioner Fiji ke **Lemhannas RI** (hal 7)

**04**

Kunjungan National Defence  
College (NDC) India  
ke Lemhannas RI

**05**

Diskusi Sistem  
Ketahanan Nasional  
bersama Forum Guru Besar ITB

**10**

Laporan Studi Strategis  
Luar Negeri (SSLN)  
PPRA LVI Lemhannas RI ke  
Korea Selatan

- 2 CSC Singapura Diskusikan Kerja Sama Pendidikan Kepemimpinan dengan Lemhannas RI
- 3 Wiranto: "Indonesia Merupakan Driving Force untuk ASEAN"
- 4 Kunjungan National Defence College (NDC) India ke Lemhannas RI
- 5 Diskusi Sistem Ketahanan Nasional bersama Forum Guru Besar ITB
- 6 Dengan "Kerja Bersama", Lemhannas RI Berkewajiban Moral Perkuat Nilai - Nilai Luhur Bangsa
- 7 Kunjungan High Commissioner Fiji ke Lemhannas RI
- 8 Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Membahas "Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Nasional" Wakil Presiden Jusuf Kalla Berikan
- 9 Pembekalan kepada Peserta Pendidikan Lemhannas RI
- 10 Laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) PPRA LVI Lemhannas RI ke Korea Selatan
- 11 Lemhannas RI Tingkatkan Solidaritas melalui Perayaan Iduladha
- 12 Lemhannas RI Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi DPR I

## tim redaksi

Pengarah:

**Arif Wachyunadi**

Penanggung Jawab:

**Mindarto**

Redaktur Pelaksana:

**Wahyu Widji Pamungkas**

Penyunting/Editor:

**Bambang Iman Aryanto**

Staf Redaksi: **Ni Made Vira Saraswati, Endah Heliana, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitrilia**

Desain: **Bambang Iman Aryanto**

Fotografer: **Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto**

Sekretariat: **Linda Purnamasari, Gatot, Ayu Novitasari**

Alamat Redaksi:

**Biro Humas Settama Lemhannas RI,**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109**

Fax. **(021) 3451926**

Website **<http://www.lemhannas.go.id>**

## CSC Singapura Diskusikan Kerja Sama Pendidikan Kepemimpinan dengan Lemhannas RI



**D**isambut oleh Plt. Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto, Delegasi Civil Servant College of Singapore (CSC Singapura) yang dipimpin oleh Direktur CSC Singapura Tina Ng Saw Tin melakukan kunjungan kehormatan ke Lemhannas RI di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lemhannas RI pada Kamis (10/8).

Dalam kunjungan tersebut, Karsiyanto menyampaikan selamat datang dan permohonan maaf atas ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur karena adanya kegiatan yang tidak dapat ditunda. "Saya menyampaikan selamat datang dan kami memohon maaf atas ketidakhadiran Gubernur dan wakil Gubernur," jelas Karsiyanto.

Selain menyampaikan salam hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas RI, Karsiyanto juga menyampaikan bahwa hasil diskusi kali ini akan dilaporkan kepada Gubernur Lemhannas RI.

Sementara itu pimpinan delegasi CSC Singapura Tina Ng Saw Tin menyampaikan kunjungan kali ini bukanlah merupakan kunjungan pertama CSC ke Lemhannas RI. Tina juga menuturkan bahwa CSC adalah lembaga yang memiliki kemiripan tugas dengan Lembaga Administrasi Negara di Indonesia. CSC mendidik Pegawai Negeri di Singapura dari berbagai institusi dan jabatan dan lebih fokus kepada pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pertemuan ini, Tina berharap dapat mendiskusikan lebih lanjut mengenai kerja sama dengan Lemhannas RI terkait dengan program pendidikan kepemimpinan.

Beberapa hal yang menjadi fokus CSC Singapura, lanjut Tina, adalah kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi publik dan pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat. Pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh CSC dapat diikuti oleh seluruh kementerian di Singapura karena sifat dari pelatihan tersebut adalah pelatihan dasar.

Karsiyanto menanggapi positif maksud kerja sama yang disampaikan oleh pihak CSC Singapura dan diskusi tersebut dilanjutkan dengan diskusi yang lebih mendalam mengenai program-program pendidikan yang dapat dijadikan kerja sama oleh kedua institusi.

Hadir mendampingi Plt. Deputi Pendidikan Tingkat Nasional dalam pertemuan tersebut adalah Prof. Dr. Fashbir Noor Sidin, S.E., M.S.P, Plt. Kepala Biro Kerja Sama Mayjen TNI Ivan Ronald Pelealu, Kepala Biro Humas Brigjen TNI Mindarto, dan Kepala Bagian Kerja

Sama Internasional Kolonel Lek Rujito.

Dalam pertemuan ini, Tina berharap dapat mendiskusikan lebih lanjut mengenai kerja sama dengan Lemhannas RI terkait dengan program pendidikan kepemimpinan.

Beberapa hal yang menjadi fokus CSC Singapura, lanjut Tina, adalah kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi publik dan pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat. Pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh CSC dapat diikuti oleh seluruh kementerian di Singapura karena sifat dari pelatihan tersebut adalah pelatihan dasar.

Karsiyanto menanggapi positif maksud kerja sama yang disampaikan oleh pihak CSC Singapura dan diskusi tersebut dilanjutkan dengan diskusi yang lebih mendalam mengenai program-program pendidikan yang dapat dijadikan kerja sama oleh kedua institusi.

Hadir mendampingi Plt. Deputi Pendidikan Tingkat Nasional dalam pertemuan tersebut adalah Prof. Dr. Fashbir Noor Sidin, S.E., M.S.P. Plt. Kepala Biro Kerja Sama Mayjen TNI Ivan Ronald Pelealu, Kepala Biro Humas Brigjen TNI Mindarto, dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kolonel Lek Rujito. ●

## Wiranto: “Indonesia Merupakan Driving Force untuk ASEAN”



Sejak terbentuknya ASEAN, peranan Indonesia tidak pernah surut dari tahun ketahun, setiap permasalahan yang terjadi di ASEAN, Indonesia selalu tampil aktif dan bahkan ikut serta dalam memelopori penyelesaian permasalahannya, hal ini menjadikan Indonesia sebagai driving force di ASEAN” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H. dalam kuliah umum kepada peserta PPRA LVI dan PPSA XXI Lemhannas RI dengan tema “Peran Indonesia Sebagai Driving Force Stabilitas Politik dan Keamanan ASEAN”, di Ruang Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI pada Jumat (11/8).

Wiranto pada ceramahnya menyampaikan, kawasan Asia Tenggara sebelum ASEAN terbentuk merupakan kawasan yang penuh konflik dan gejolak. Negara-negara Asia Tenggara saat itu masih dalam tahap awal nation building yang penuh dinamika internal sebagai negara yang baru terlepas dari penjajahan, meskipun Thailand tidak termasuk negara terjajah, namun tetap saja kawasan tersebut menjadi ajang perebutan pengaruh kekuatan luar akibat Perang Dingin.

Kemampuan ASEAN menciptakan dan memelihara stabilitas dan perdamaian di lingkup kawasan telah mampu

mendorong kemajuan diberbagai bidang, khususnya dibidang pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, ASEAN dinilai sebagai organisasi kawasan yang sukses apabila dibandingkan organisasi-organisasi kawasan lainnya.

Lalu bagaimana peranan Indonesia di ASEAN? Menurut Wiranto, sejak terbentuknya ASEAN, peranan Indonesia tidak pernah surut dari tahun ketahun. Setiap permasalahan yang terjadi di ASEAN, Indonesia selalu tampil aktif dan bahkan ikut serta dalam memelopori penyelesaian permasalahannya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai driving force di ASEAN.

“Indonesia harus terus memegang peranan pada ASEAN. Mengingat masa depan Indonesia adalah masa depan ASEAN, dan sebaliknya, masa depan ASEAN juga masa depan Indonesia. Kemajuan itu terletak pada ikhtiar kita semua, masyarakat Indonesia, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat ASEAN” ungkap Wiranto.

Kuliah umum yang digelar kali ini mendapatkan antusias dari para peserta PPRA LVI dan PPSA XXI yang memenuhi ruangan Auditorium Lemhannas RI. Setelah melalui sesi tanya jawab, acara diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Wiranto dan foto bersama. ●

# Kunjungan National Defence College (NDC) India ke Lemhannas RI



**D**elegasi National Defence College (NDC) India melakukan kunjungan ke Lemhannas RI pada Senin (28/8) yang diawali dengan Courtesy Call antara Ketua Rombongan NDC Shri Abhay Tripathi dengan Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo di Gedung Trigatra, Lemhannas RI. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama tenaga ahli dan pejabat Lemhannas RI dan dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional Lemhannas RI Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P dengan narasumber Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hankam Lemhannas RI Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum.

Dalam sambutannya, Ketua Rombongan NDC Shri Abhay menyebutkan bahwa Kunjungan NDC India ke Lemhannas RI tiap tahunnya adalah untuk memperluas wawasan bagi peserta NDC India. "Diskusi yang dilakukan dengan pihak Lemhannas RI tidak hanya memperluas pengetahuan kami mengenai masalah keamanan, pertahanan, dan keamanan kawasan, tetapi juga meningkatnya kesepahaman dan hubungan kerjasama antar Indonesia dan India di masa depan," kata Shri Abhay membuka diskusi dengan para tenaga ahli Lemhannas RI di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lt. 3, Lemhannas RI.

"Saya tentu saja menyambut baik dalam kunjungan singkat

kami ke Lemhannas RI karena bisa bertukar pikiran, pengetahuan, dan pengalaman yang komprehensif dengan para tenaga ahli dan peserta pendidikan di Lemhannas RI," tutur Shri Abhay melanjutkan. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hankam Lemhannas RI Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum. dengan judul "Keamanan Nasional Indonesia" yang membahas kepentingan nasional Indonesia, postur keamanan, tujuan, konsep perencanaan kapabilitas keamanan Indonesia, doktrin Presiden Joko Widodo mengenai Kebijakan Poros Maritim Dunia, dan isu keamanan seperti konflik Laut China Selatan, ASEAN dan keamanan kawasan, terorisme, serta illegal fishing.

Dalam kesempatan tersebut Laksda TNI Agung Pramono menyebutkan bahwa keamanan nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan kepentingan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Diskusi kemudian diakhiri dengan tukar-menukar cenderamata antar kedua institusi. ●

# Diskusi Sistem Ketahanan Nasional bersama Forum Guru Besar ITB



Lemhannas RI dan Forum Guru Besar-Institut Teknologi Bandung (FGB-ITB) melakukan diskusi yang membahas Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan simulasi kebijakan publik pada Senin (15/8), di Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas), Gedung Astagatra Lt. 8 Lemhannas RI.

Diskusi ini diawali dengan perkenalan dari anggota Forum Guru Besar ITB yang dipimpin Prof. Ketut Wikantika. Dengan kunjungan dan diskusi Lemhannas RI dan FGB ITB, Prof. Ketut berharap ITB dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem pengukuran ketahanan nasional. "Saya berharap ITB bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sistem yang dibangun di Lemhannas RI," ucap Prof. Ketut saat memberikan sambutannya.

Selanjutnya, Ketua Labkurtannas Lemhannas RI, Prof. Dr. Miyasto, S.U. menyampaikan penjelasan mengenai tugas pokok dari Labkurtannas, yaitu pertama adalah mengembangkan sistem pengukuran ketahanan nasional dan simulasi kebijakan publik untuk mengetahui bagaimana situasi ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kedua adalah membuat potret ketahanan nasional di tingkat provinsi.

"Fungsi sistem pengukuran ketahanan nasional dan simulasi kebijakan publik yang dikembangkan Lemhannas RI dibangun dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pokok fungsi Lemhannas RI, yaitu mendidik kader-kader pemimpin nasional, melakukan kajian yang bersifat strategik dan konseptual, serta memantapkan nilai-nilai kebangsaan," tambah Prof. Miyasto.

Penyelenggaraan diskusi Lemhannas RI dan FGB ITB ini bisa menjadi salah satu wadah untuk merespon kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta isu yang berkembang untuk melepaskan kendala ruang dan waktu sehingga membawanya pada peradaban dan kehidupan yang baru serta berperan dalam pengembangan peradaban sekaligus penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dunia.

Para peserta diskusi yang antusias pada sesi tanya jawab, berharap sistem yang dibangun mampu menjadi early warning terhadap kondisi ketahanan nasional. Sementara Prof. Ketut sendiri mengharapkan adanya pertemuan-pertemuan diskusi lanjutan yang bersifat konstruktif dalam pengembangan sistem pengukuran ketahanan nasional dan kebijakan publik yang dapat mendukung pengukuran ketahanan nasional. ●



## Dengan “Kerja Bersama”, Lemhannas RI Berkewajiban Moral Perkuat Nilai - Nilai Luhur Bangsa

**G**otong royong sendiri merupakan budaya bangsa Indonesia sejak dahulu yang menyadari pentingnya menjadi makhluk sosial yang hidup saling berdampingan dan berinteraksi sesama individu lainnya,” ujar Deputy Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto ketika membacakan sambutan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-72 di Lemhannas RI pada Kamis (17/8).

Dedy Yulianto menuturkan bahwa semangat gotong royong sejak dahulu sebenarnya telah terbentuk kokoh antar suku, agama, ras maupun golongan. Kebersamaan antar seluruh komponen bangsa tersebut, lanjut Dedy Yulianto, telah menjadi perekat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kebersamaan tersebutlah yang menjadi modal bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita - cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Arus globalisasi yang ditandai dengan adanya demokrasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menjadi tantangan yang berat bagi bangsa ini. Globalisasi, jelas Dedy Yulianto, tanpa disadari menggerus nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat seperti gotong royong, toleransi, ketaatan hukum, moral, dan etika.

Dedy Yulianto juga menyampaikan bahwa Hari Ulang Tahun ke - 72 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengangkat tema

“Kerja Bersama” dirasa sangatlah tepat. “Momentum ini harus mampu kita manfaatkan dengan bijak untuk memperkuat nilai - nilai luhur bangsa ini di dalam kehidupan masyarakat sehingga mampu menjadi modal besar bangsa ini untuk mencapai tujuan dan cita - cita nasional,” tegas Dedy Yulianto.

Dengan tema “Kerja Bersama”, Lemhannas RI yang terbentuk atas dasar Empat Konsensus Dasar Bangsa memiliki kewajiban moral untuk turut memperkuat nilai - nilai luhur bangsa melalui peran, tugas pokok, dan fungsi yang dimilikinya dengan merangkul berbagai komponen bangsa dari berbagai kalangan pada bidang pendidikan, pengkajian strategik maupun pemantapan nilai - nilai kebangsaan.

Di tengah persaingan global dan dinamika geopolitik global, “Kerja Bersama” tidaklah cukup. Oleh karena itu, Dedy Yulianto mengatakan, peringatan 72 tahun Indonesia merdeka harus menjadi momentum untuk memperkuat nilai - nilai luhur bangsa di dalam masyarakat dan meningkatkan kompetensi serta daya saing bangsa Indonesia.

Sebelum menutup sambutan, Dedy Yulianto menyampaikan untuk memanfaatkan momentum 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini dalam meningkatkan budaya kerja bersama dan memperkuat semangat gotong royong dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi kita masing - masing.

Upacara Peringatan 72 tahun Kemerdekaan Indonesia ini diikuti oleh seluruh Pegawai dan Pejabat Struktural Lemhannas RI serta Peserta Pendidikan PPRA LVI dan PPSA XXI Lemhannas R ●

# Kunjungan High Commissioner Fiji ke Lemhannas RI



**M**arsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P. menerima kunjungan dari High Commissioner Fiji yang dipimpin oleh Commodore H.E. Esala Teleni di Gedung Nusantara II, Lemhannas RI pada Rabu (16/08).

Kunjungan ini membahas mengenai bagaimana kerjasama antara Indonesia dengan Fiji dalam berbagai aspek nasional yang berfokus pada tantangan regional dan ancaman global serta menangani bencana alam. Pertemuan dibuka melalui kata sambutan dari ketua diskusi yaitu Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P., yang mengatakan, “Saat ini prioritas Presiden Jokowi dalam tantangan regional adalah membangun infrastruktur yang merata di setiap bagian dari Republik Indonesia serta ekonomi yang merata sehingga tidak ada perbedaan harga di tiap daerah Indonesia terutama pada bagian timur yang sangat dekat dengan Fiji. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang merata di tiap daerah ini diharapkan dapat membangun pendidikan, pemikiran, dan kesadaran bahwa kita adalah Indonesia dan juga dapat mengatasi ancaman kesenjangan regional.

Setelah sambutan, diskusi dibuka oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Sebastianus Sumarsono, S.I.P. mengatakan, “Sejak tahun 2015, Indonesia sudah menjadi anggota dari The Melanesia Spearhead Group (MSG) jadi dengan bergabungnya Indonesia maka Indonesia tidak akan memiliki perbedaan dengan anggota MSG lainnya, dengan kooperasi ini saya berharap Indonesia dan Fiji akan saling mendukung dan menerima paradigma baru untuk memperkuat perdamaian dan kemakmuran antara Indonesia dan Fiji”.

MSG merupakan organisasi internasional yang terdiri dari empat negara di Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru. Pada bulan Juni 2015, Indonesia diterima sebagai anggota rekan. The Melanesian Spearhead Group dibentuk dengan fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara negara-negara Melanesia.

Diskusi dilanjutkan dengan membahas mengenai strategi keamanan regional yang membahas mengenai tingkatan operasional, karena ancaman yang akan datang selanjutnya adalah kita akan berbicara mengenai permasalahan keamanan global dan bagaimana hal tersebut akan memberikan dampak kepada situasi regional saat ini. Laksda Agung Pramono, S.H., M.Hum. menjelaskan kita harus mengidentifikasi dan menentukan kesamaan ancaman yang kita hadapi, seperti illegal fishing, human trafficking selanjutnya kita harus membuat kesamaan strategi didalam menghadapi ancaman tersebut. Kita juga bisa membuat kerjasama seperti pada saat ancaman Malawi dimana Indonesia mengadakan Trilateral dengan Malaysia dan Philipina dalam mengatasi ancaman di Malawi. Selanjutnya adalah apa yang akan dapat kita lakukan antara Indonesia dan Fiji.

Commodore H.E. Esala Teleni kemudian menutup pembahasan diskusi tersebut dengan menyatakan, “Yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana agar Indonesia dan Fiji dapat melakukan kerjasama dalam menghadapi ancaman-ancaman global, dan saya yakin jika kita sudah mengetahui ancaman dan membuat strategi bersama untuk menghadapi ancaman tersebut maka kita bisa melakukannya. ●

## Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Membahas “Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Nasional”



**M**enteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak RI Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dipl. Apling, M.A. membawakan materi mengenai “Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Nasional” kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI di Ruang Bhineka Gedung Panca Gatra Lemhannas RI pada Selasa (22/08).

Acara ini dibuka dengan perkenalan Menteri Yohana, yang merupakan Guru Besar pertama dari Tanah Papua sepanjang sejarah RI. Menteri Yohana menjelaskan tujuan Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak RI yaitu berkomitmen kuat dalam pembangunan sumber daya manusia terutama wanita yang berkualitas guna menyongsong Gender Equality Planet 50:50 pada tahun 2030. Gender Equality Planet 50:50 adalah sebuah kampanye yang dicetuskan oleh PBB yang mempunyai visi dan misi untuk menyetarakan perempuan agar mendapatkan hak yang sama dengan lelaki dalam semua aspek kehidupan, tanpa mengurangi norma dan kodrat sebagai perempuan.

Selanjutnya Menteri Yohana membahas mengenai mengapa perempuan dan anak sangat penting bagi suatu bangsa. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi berkumpul bersama seluruh kepala negara di dunia untuk membahas mengenai kesetaraan gender. Dari 17 indikator, perempuan menjadi salah satu perhatian dunia saat ini. Indonesia ditunjuk sebagai sepuluh negara besar untuk bisa mencapai Gender Equality Planet 50:50 pada tahun 2030, karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar serta memiliki toleransi yang tinggi dan wanita Indonesia saat ini sudah maju. Menteri Yohana mengatakan, “Hampir di seluruh dunia,

perempuan masih dinomorduakan dan masih menjadi korban dalam berbagai bentuk tindakan pelanggaran. Negara belum bisa disebut maju. Tidak akan bisa bebas dari kemiskinan bila perempuan belum ada di garis aman. Ini menjadi satu tugas utama kami dari Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak RI untuk mempersiapkan perempuan dalam menyukseskan komitmen global.”

Menteri Yohana selanjutnya memaparkan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih menduduki peringkat 113 dari 188 dari negara di dunia, selanjutnya Indeks Pembangunan Global (IPG) masih cukup menantang karena menduduki peringkat 108 dari 187, dan yang terakhir adalah Indeks Ketidakadilan Gender di Indonesia berada pada peringkat 103 dari 187 negara di dunia. Permasalahan yang dihadapi wanita Indonesia saat ini masih sangat banyak, seperti kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan keluarga, kekerasan seksual, dan juga kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sangat intensif datang ke daerah-daerah dan memberikan materi kepada kepala-kepala daerah untuk mengingatkan bagaimana pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dilakukan, lanjut Menteri Yohana, karena mereka belum menyadari bahwa perempuan dan anak adalah pilar yang sangat penting bagi suatu bangsa.

Menteri Yohana diakhir ceramahnya mengatakan, “Saat ini dunia berubah, ekonomi juga ikut berubah. Oleh karena itu, kita harus bisa untuk mandiri, membangun keluarga yang mandiri karena perempuan di Indonesia sudah cukup maju dan kita harus bangga mempunyai perempuan-perempuan hebat di bangsa ini”.



## Wakil Presiden Jusuf Kalla Berikan Pembekalan Kepada Peserta Pendidikan Lemhannas RI



**K**ita harus mengetahui posisi kita berada dimana dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan (nasional) tersebut,” ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Pembekalan Peserta PPRA LVI dan PPSA XXI di Istana Wakil Presiden pada Senin (28/8).

Dalam pembekalan yang diawali dengan laporan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo tersebut, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa sejatinya semua negara memiliki tujuan yang hampir sama. Indonesia, lanjut Jusuf Kalla, memiliki empat tujuan nasional yang tertera di konstitusi yaitu memajukan negeri, memakmurkan bangsanya dengan adil, mencerdaskan bangsa, dan mencapai perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bangsa Indonesia harus menyadari posisi peran masing-masing dan apa yang harus dilakukan untuk meraih tujuan tersebut.

Jusuf Kalla juga menyampaikan bahwa Lemhannas RI sebagai Lembaga Pendidikan Tertinggi secara formal bagi para calon pemimpin nasional harus dapat merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, Jusuf Kalla mengutarakan bahwa tujuan nasional juga dapat bersifat dinamis namun tetap berdasarkan hal-hal pokok. Sebut saja, untuk mengukur kemajuan suatu negara, menurut Jusuf Kalla dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi meskipun tidak dapat dipisahkan dari masalah kebangsaan, politik, dan sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pertumbuhan ekonomi harus menjadi fokus utama karena hal tersebut sangat berkaitan dengan masalah-masalah yang

timbul saat ini, salah satunya adalah masalah ketidakadilan. Masalah ketidakadilan di Indonesia sejak jaman kemerdekaan, lanjut Jusuf Kalla, telah melahirkan 15 konflik besar. Konflik tersebut dikatakan sebagai konflik besar karena menelan lebih dari 1000 korban seperti PKI di Madiun, Permesta, DI TII, Pemberontakan di Aceh, dan Pemberontakan di Ambon.

Mengenai sistem pemerintahan, Jusuf Kalla menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan otonom sehingga harus memaksimalkan pemerintah daerah atau regional dan tidak hanya fokus pada pemerintah pusat.

Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi juga harus dibenahi. Untuk membenahi hal tersebut, para pimpinan yang menjabat di kementerian dan lembaga pemerintah harus bekerja sama melalui koordinasi lintas sektor dan tidak mementingkan ego sektoral.

Jusuf Kalla berharap para peserta PPRA LVI dan PPSA XXI dapat menjadi pemimpin yang berpandangan luas usai mengikuti pendidikan di Lemhannas RI dan dapat bekerja sama antar instansi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan cita-cita nasional.

Pembekalan yang dilanjutkan dengan dialog dengan para peserta PPRA LVI dan PPSA XXI, turut dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Arif Wachyunadi, Para Pejabat Struktural, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI. Acara yang berlangsung selama dua jam tersebut diakhiri dengan foto bersama. ●



## Laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) PPRA LVI Lemhannas RI ke Korea Selatan

Pada 30 Agustus 2017, peserta PPRA LVI menyampaikan laporan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Korea Selatan dihadapan Gubernur Lemhannas RI, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional Lemhannas RI. Kegiatan SSLN tersebut diikuti oleh 26 orang peserta PPRA yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Demografi Laksda TNI Ir. Yuhastihar dan didampingi oleh Tenaga Profesional Bidang Strategi dan Kewaspadaan Nasional Mayjen TNI (Purn.) Abdul Chasib.

Tujuan SSLN tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran dan masukan guna meningkatkan prospek hubungan RI dengan Republik Korea Selatan dalam perspektif pembangunan nasional. Tempat yang dikunjungi oleh PPRA LVI Lemhannas RI adalah KBRI, Instansi Pemerintahan, pusat turisme, dan beberapa industri strategis di Korea Selatan. Dalam kunjungan ke Korea Selatan, para peserta mendapatkan gambaran mengenai negara Korea Selatan dalam perspektif Astagatra, sejarah pembangunan Korea Selatan, prospek hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.

Dalam paparan disampaikan juga mengenai sejarah Korea Selatan dimana kawasan tersebut merupakan wilayah perebutan konflik antara kekuatan Barat dan Timur. Akan tetapi dalam

perkembangannya, negara tersebut berhasil keluar dari krisis ekonomi karena kekuatan mental dan perhatian pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga didukung oleh Jepang dan Amerika Serikat baik dalam aspek pertumbuhan teknologi, pengembangan SDM, maupun dukungan finansial.

Pada 2017 ini, hubungan Indonesia dan Korea Selatan menginjak umur 44 tahun. Permasalahan hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan adalah masih lemahnya law enforcement, minimnya dukungan infrastruktur, kurangnya informasi, dan masih lemahnya kedua pemerintah dalam menginisiasi kerjasama antar dua negara.

Bagi para peserta, kunjungan SSLN memberikan manfaat antara lain para peserta dalam melihat secara langsung aktivitas obyek strategis yang dikunjungi dan diperoleh informasi akurat. Informasi tersebut dikemudian hari dapat digunakan sebagai bahan kajian strategis tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan mengenai negara Korea Selatan. Peserta juga mendapat pengalaman yang lebih luas dan mendalam tentang penyelenggaraan pembangunan di negara tujuan sehingga dapat meningkatkan wawasan para peserta dan memperluas wawasan serta pengetahuan dalam rangka mendukung pelaksanaan seminar di akhir pendidikan. ●

# Lemhannas RI Tingkatkan Solidaritas melalui Perayaan Iduladha



**D**alam rangka Perayaan Hari Raya Iduladha 1438 H, Lemhannas RI menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan pada Senin (4/9) di Pelataran Parkir Timur Lemhannas RI.

Dalam pembukaan Perayaan Hari Raya Iduladha tersebut, Kolonel Cba Iyan Supriyana selaku Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban melaporkan bahwa jumlah hewan kurban di Lemhannas RI sebanyak 14 ekor sapi dan tiga ekor kambing. Hasil dari penyembelihan hewan kurban tersebut nantinya akan didistribusikan ke seluruh keluarga besar Lemhannas RI dan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya menuturkan bahwa ibadah kurban yang dilaksanakan tiap tahunnya tersebut, merupakan hakikat dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang ritual penyembelihan hewan. Dari kisah tersebut mengandung beberapa makna, yaitu totalitas kepatuhan kepada Allah SWT, kemuliaan manusia, dan pengorbanan. Esensi kurban itu sendiri, lanjut Agus Widjojo adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap ridho Allah SWT.

“Perayaan iduladha 1438 H oleh keluarga besar Lemhannas RI tahun ini mengangkat tema ‘Dengan Hikmah Iduladha Kita Tingkatkan Solidaritas Sosial di Lingkungan Lemhannas RI’.

Rasa kebersamaan, kesatuan dan simpati dapat diartikan sebagai perasaan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama dalam hubungan masyarakat ataupun hubungan sosial yang setiap orang terikat satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tema tersebut harus dipahami tidak saja dalam konteks sosial sehari-hari, namun harus pula dipahami dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

Menutup sambutannya, Agus Widjojo berharap dengan adanya Perayaan Iduladha ini, segenap keluarga Lemhannas RI senantiasa melakukan kewajiban kepada Allah SWT dan sesama umat manusia secara seimbang. Selain itu, Iduladha kali ini diharapkan juga dapat menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan terus bersyukur kepada Allah SWT.

Perayaan Iduladha ini kemudian dilanjutkan dengan acara penyembelihan hewan kurban yang ditandai dengan prosesi simbolis penyerahan hewan kurban dari Gubernur Lemhannas RI kepada Ketua Panitia Penyembelihan hewan Kurban Iyan Supriyana.

Hadir dalam Perayaan Iduladha tersebut adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi, para Deputi, Pejabat Struktural Lemhannas RI, Tenaga Profesional, Tenaga Pengkaji, Tenaga Pengajar, Pengurus IKAL serta Perista Lemhannas RI. ●

## Lemhannas RI Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi DPR I



Lemhannas RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI mengenai RKA K/L tahun 2018 pada Senin (4/9) di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Dr. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., Akt., C.A. tersebut, Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi selaku Sekretaris Utama Lemhannas RI menyampaikan dua hal yaitu Pagu Anggaran Lemhannas RI pada tahun 2018 dan Rencana Kerja Anggaran Lemhannas RI tahun 2018.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI dan Bappenas RI pada tanggal 25 Juli 2017, menyatakan bahwa Pagu Lemhannas RI pada tahun 2018 sebesar Rp 277.698.000.000,- telah dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran pada tiga program yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur, serta Program Pengembangan Ketahanan Nasional.

Program Pengembangan Ketahanan Nasional sendiri terbagi dalam tiga kedeputian yaitu Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, dan Kedeputian Pengkajian Strategik termasuk untuk mendukung Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas).

Arif Wachyunadi mengatakan bahwa hasil dari rapat tiga pihak (trilateral) antara Lemhannas RI, Bappenas RI dan Kementerian Keuangan RI pada tanggal 23 Mei 2017, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lemhannas RI tahun anggaran 2018 memiliki program prioritas yaitu program revolusi mental yang nantinya dilaksanakan melalui program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan proyeksi fokus kegiatan ketahanan nasional yang dititikberatkan pada wilayah timur Indonesia.

Selain itu, terkait usulan program Jakarta Geopolitical Forum (JGF), Lemhannas RI mendapat rekomendasi dari Bappenas RI agar program tersebut dapat menjadi program prioritas pada tahun anggaran 2018. Rapat Dengar Pendapat tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi lebih lanjut dengan Komisi I DPR RI. ●